



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 17 Mei 2024, Revised: 2 Agustus 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Tantangan Bangsa Indonesia Menuju *Bonum Communae* Perspektif *Etika Eudaimonia* Aristoteles

Yosef Redemptus Bria¹, Oktovianus Kosat², Mario Venerial Umbu Zerri³

¹ Fakultas Filsafat, UNWIRA Kupang, Indonesia, giusepperedem@gmail.com

² Fakultas Filsafat, UNWIRA Kupang, Indonesia, kosatkote11@gmail.com

³ Fakultas Filsafat, UNWIRA Kupang, Indonesia, mariozerri05@gmail.com

Corresponding Author: giusepperedem@gmail.com

Abstract: *The value of justice is one of the virtues of Indonesian life contained in the fifth principle of Pancasila. As the main value that sustains the common life, the value of justice receives serious attention from the government. As an institution and forum that has the authority to ensure justice, the government has the responsibility to pursue justice. However, there are always challenges and obstacles that can dwarf the flourishing of justice in this country. The purpose of this research is to review and analyze these obstacles. The object of research is the practice of bonum communae in Indonesia. The main theory used to facilitate the research and as the main reference is Aristotle's concept of eudaimonia ethics. The method used is literature. In this research, it is found that the challenges that always hinder efforts to prioritize bonum communae in Indonesia are the inequality between the poor and the rich, the lack of effective governance in government, the ecosystem crisis that can affect many aspects of life together. The results of this research will be very helpful in understanding the existing obstacles, so that the government and all Indonesian people have a definite reference in an effort to prioritize the common good in state life.*

Keyword: *Bonum Communae, Eudaimonia Ethics, Challenges.*

Abstrak: Nilai keadilan merupakan salah satu keutamaan hidup bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Sebagai suatu nilai utama yang menopang kehidupan bersama, maka nilai keadilan mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Sebagai suatu lembaga dan wadah yang memiliki otoritas dalam menjamin keadilan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengupayakan keadilan. Namun, selalu ada tantangan dan hambatan yang dapat mengerdilkan substansi keadilan di negeri ini. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau dan menelaah hambatan-hambatan tersebut. Objek penelitian adalah praktik bonum communae yang ada di Indonesia. Teori utama yang digunakan untuk memperlancar penelitian dan sebagai rujukan utama adalah konsep etika eudaimonia Aristoteles. Metode yang digunakan adalah kepustakaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tantangan yang selalu menghambat upaya mengutamakan bonum communae di Indonesia adalah adanya ketimpangan derajat antara yang miskin dan kaya, kurang efektifnya tata kelola dalam pemerintahan, adanya krisis ekosistem yang dapat

mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan bersama. Hasil dari penelitian ini akan sangat membantu dalam memahami hambatan yang ada, sehingga pemerintah dan semua masyarakat Indonesia mempunyai rujukan yang pasti dalam usaha mengutamakan kepentingan bersama dalam hidup bernegara.

Kata Kunci: Bonum Communae, Etika Eudaimonia, Tantangan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, etnis, dan sumber daya alam, menjadikannya sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Di tengah perbedaan mendorong pemerintah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Keberhasilan suatu bangsa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama menjadi tujuan utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Salah satu konsep pemikiran filsuf Yunani yang terkenal ialah etika *eudaimonia* Aristoteles menjadi landasan untuk memahami esensi kebahagiaan dan kebaikan bersama bagi bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan hidup bangsa. Pemikiran Aristoteles tentang *eudaimonia*, atau kebahagiaan yang terkait dengan kehidupan bermoral, menjadi kerangka pemahaman yang cukup relevan bagi masyarakat Indonesia dalam mengejar tujuan bersama. Namun melihat kondisi nyata, Indonesia dihadapkan pada tantangan serius seperti ketidaksetaraan, konflik sosial, dan beberapa persoalan terkait kehidupan bersama yang menjadi hambatan untuk mencapai *bonum communae*. Salah satu tantangan mendasar adalah ketidaksetaraan ekonomi yang masih merajalela di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin terus memperlebar kesenjangan sosial. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, menghambat realisasi potensi masyarakat secara menyeluruh. (Rifqi Alya Nur Ainayah, 2023, p. 4)

Peran politik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia pun tidak dapat diabaikan. Politik memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan publik, distribusi sumber daya, dan stabilitas sosial, dalam konteks analisis etika *eudaimonia* Aristoteles terhadap *bonum communae*, perlu dipahami bagaimana dinamika politik berkontribusi atau menghambat pencapaian tujuan tersebut. Politik di Indonesia seringkali mencerminkan dinamika kekuasaan dan rivalitas antar kepentingan. Tantangan terbesar adalah risiko korupsi di berbagai tingkat pemerintahan, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan pembangunan dan mengakibatkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. (Salma Napisa & Hafizh Yustio, 2021, p. 2) Oleh karena itu penting untuk memahami bagaimana etika *eudaimonia* Aristoteles dapat menjadi landasan moral bagi para pemimpin politik untuk melayani kepentingan masyarakat secara adil dan transparan. Selain itu, polarisasi politik dan konflik kepentingan antar partai seringkali menghambat pembentukan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Dalam pandangan *eudaimonia*, mencapai kebaikan bersama membutuhkan kerjasama. Dalam kerangka politik, kerja sama lintas partai dan kesatuan visi untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah partisipasi politik masyarakat. Sebuah demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (M. Riyanto & Vitalina Kovalenko, 2023, p. 5). Namun realitasnya menunjukkan adanya ketidakpuasan dan alienasi politik di kalangan masyarakat. Konflik sosial, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, turut menjadi hambatan dalam mencapai *bonum communae*. Ketidakharmonisan antar-etnis, agama, dan kelompok sosial seringkali mengakibatkan ketegangan yang dapat

mengancam keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap prinsip *eudaimonia* dapat menjadi kunci dalam membimbing masyarakat mengatasi perbedaan dan membangun solidaritas yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam konteks global, perubahan iklim dan degradasi lingkungan merupakan tantangan eksternal yang perlu diatasi. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Pemikiran Aristoteles tentang keberlanjutan, dapat menjadi fondasi untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Demi meminimalisir keruntuhan serta keretakan ciri khas manusia yakni makhluk sosial, penulis melihat bahwa etika *eudaimonia* Aristoteles memiliki potensi sebagai penopang dan perekat untuk menjaga tatanan sosial masyarakat tetap harmonis. Pertimbangan intelektual memungkinkan keputusan yang diambil untuk merancang solusi yang riil dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Hal ini penting dalam konteks pembangunan masyarakat, dimana tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketegangan sosial, dan perubahan lingkungan memerlukan pendekatan yang mendalam.

Yoga Febriano, dalam penelitiannya yang berjudul “Bencana, Penderitaan, dan Kebahagiaan (Suatu Refleksi Filosofis atas Penderitaan Manusia di Tengah Bencana dalam Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles)”, menemukan bahwa kebahagiaan hanya dapat diraih oleh manusia jika manusia selalu melakukan atau mengalami kebaikan dalam hidupnya. Bila manusia jauh dari berbagai hal yang berkaitan dengan kebaikan, maka kebahagiaan akan sulit dialami oleh manusia. (Febriano, 2022, p. 40) Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus, dalam penelitiannya yang berjudul “Eudaimonia Filsafat Dalam Kontemporer Dengan Memahami Kebahagiaan Menurut Aristoteles” menemukan bahwa generasi milenial saat ini dapat menemukan kebahagiaan melalui berbagai cara yang sesuai dengan situasi saat ini, seperti meditasi, pemusatan perhatian atau fokus dan berpikir secara filosofis. Konsep filosofis Aristoteles tentang Eudaimonia dapat menjadi rujukan bagi masyarakat modern dalam menemukan kebahagiaan di tengah kebisingan dunia saat ini. (Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus, 2023b, p. 824) Andi Mauliyana & Astrid Veranita Indah, dalam penelitiannya di bawah judul “*Eudaimonia* dalam Filsafat Stoa Sebagai Dasar Etika” menyimpulkan bahwa kebahagiaan hanya dapat diraih bila manusia hidup dalam orientasi yang jelas, tidak terlalu sibuk dalam memikirkan urusan orang lain, selalu memiliki sikap berjaga-jaga dan waspada terhadap berbagai kemungkinan atau peluang terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, berbagai hal yang berada di luar kehendak dan kendali manusia harus dihindari, serta manusia perlu hidup dalam suatu kesadaran penuh akan kesementaraan di dunia ini. (Andi Mauliyana & Astrid Veranita Indah, 2023, p. 48) Sementara Adus Pinus Dandi melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Etika Aristoteles dalam Mewujudkan Perdamaian Manusia Indonesia”, mengatakan bahwa kerakusan dan ketamakan terhadap harta kekayaan menjadi faktor utama yang mengakibatkan kedamaian dalam kehidupan menjadi hilang. Manusia berlomba-lomba mengejar keuntungan pribadi tanpa memikirkan penderitaan atau kerugian orang lain. (Adus Pinus Dandi, 2023, p. 49) Sedangkan Giovanni Aditya Arum, dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Keadilan (*Iustitia*) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila” menegaskan bahwa konsep keadilan menurut Thomas Aquinas sejatinya selalu berorientasi kepada *bonum communa* (kebaikan bersama). Pemerintah dalam merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila V mestinya mempertimbangkan kepentingan umum dalam mengambil suatu kebijakan, tidak selalu mengutamakan kepentingan pribadi. (Giovanni Aditya Arum, 2019, p. 34)

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini fokus utama yang ingin dibedah oleh peneliti adalah menyangkut tantangan yang ada di Indonesia dalam upaya menegakkan kepentingan bersama (*bonum communa*). Konsep yang digunakan untuk

membedah persoalan yang ada juga berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, yakni menggunakan konsep kebahagiaan (*eudaimonia*) Aristoteles. Dengan menggunakan konsep ini, peneliti bertujuan menemukan tantangan dan hambatan apa saja yang dapat melemahkan semangat dalam menegakkan *bonum communa*e di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Kajian pustaka merupakan suatu bentuk penelitian yang mana peneliti berusaha menemukan dan merumuskan berbagai informasi secara tertulis yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara tertulis. Hal ini biasa ditemukan melalui berbagai jenis buku, artikel atau tulisan ilmiah dan berbagai penelitian ilmiah lainnya. (Khoiron, 2019, p. 41) Adapun proses yang dilalui peneliti untuk sampai pada analisis data yang efisien dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Interpretasi; Melalui karya ini peneliti mencoba menganalisis konsep *eudaimonia* dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi etos kewarganegaraan di Indonesia. Peneliti berusaha menggali hubungan antara individu dan kewarganegaraan yang bermakna serta mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kewarganegaraan dalam konteks *eudaimonia*. Induksi-deduksi; Peneliti bertolak dari data-data dan bahan yang ada, kemudian merumuskan suatu pemahaman yang lebih universal. Pemahaman yang lebih universal ini menjadi acuan bagi latar belakang seluruh data yang dirangkum oleh peneliti berkenaan dengan pemikiran Aristoteles tentang konsep *eudaimonia* dan perannya dalam membentuk etos kewarganegaraan di Indonesia. Koherensi internal; Dalam penelitian tentang *eudaimonia* dan etos kewarganegaraan di Indonesia, pendekatan ini memastikan bahwa semua elemen penelitian terhubung secara logis, dan berkontribusi pada temuan yang konsisten serta jawaban yang koheren terhadap pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan penelitian yang terstruktur dan bermakna. Holistika; Peneliti berusaha memahami bagaimana kesejahteraan individu (*eudaimonia*) terkait etos kewarganegaraan dalam kerangka budaya dan sosial Indonesia secara menyeluruh. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang bagaimana kedua konsep tersebut saling mempengaruhi dalam konteks yang lebih luas. Komparasi; Peneliti akan membandingkan berbagai kelompok masyarakat Indonesia, misalnya berdasarkan faktor demografis, geografis, atau budaya. Ini dapat membantu mengidentifikasi bagaimana konsep *eudaimonia* dan etos kewarganegaraan mungkin berbeda atau serupa di antara kelompok-kelompok ini, dan apa yang mungkin menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Analisis data; Setelah melalui beberapa tahap di atas, akhirnya peneliti akan menganalisis data-data yang ada guna menemukan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengupayakan *Bonum Communa*e dalam koridor pemikiran *Etika Eudaimonia* Aristoteles.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konsep *Bonum Communa*e

Secara etimologis, *bonum communa*e berasal dari bahasa Latin dimana *bonum* berarti kebaikan, dan *communa*e merujuk pada yang bersama atau umum. Jadi secara etimologis *bonum communa*e dapat diartikan sebagai kebaikan bersama atau kebaikan umum. Secara harfiah, *bonum communa*e dapat dimaknai sebagai kesejahteraan bersama atau kebaikan yang diperoleh atau dinikmati secara bersama-sama oleh masyarakat atau kelompok tertentu. (Datu dan Simon Untara Hendrawan, 2019, p. 9). *Bonum communa*e atau kebaikan bersama adalah konsep yang merujuk pada kesejahteraan atau kebaikan yang dinikmati atau diupayakan secara bersama-sama oleh suatu masyarakat atau kelompok. Ide ini melibatkan gagasan bahwa kesejahteraan individu terikat erat dengan kesejahteraan kolektif, sehingga tindakan atau keputusan yang diambil harus memperhatikan kepentingan bersama. Konsep *bonum*

communae umumnya mencakup aspek-aspek seperti keadilan sosial, keamanan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai yang dianggap esensial untuk mencapai kesejahteraan bersama. (Hendrawan, 2019) Dalam banyak filosofi politik dan etika, pemahaman terhadap *bonum communae* dapat berbeda-beda, tetapi prinsip dasarnya adalah bahwa kebaikan bersama harus diutamakan demi keseimbangan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Pembentukan *bonum communae* melibatkan beberapa aspek yang mencakup berbagai dimensi kesejahteraan sosial dan politik. Pertama-tama, keadilan sosial menjadi elemen kunci dalam pencapaian *bonum communae*. Keadilan sosial mencakup distribusi sumber daya dan hak-hak secara adil, dengan tujuan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang inklusif. Tanpa keadilan sosial, konsep *bonum communae* sulit terwujud, karena ketidaksetaraan ekonomi dapat menghasilkan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang lainnya. (Salsabila Nurul, 2023, p. 8).

Aspek kedua yang membentuk *bonum communae* adalah keamanan. Menjamin keamanan fisik dan keamanan sosial masyarakat merupakan prasyarat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Keamanan tidak hanya mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, tetapi juga melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan sosial yang bebas dari ketegangan dan konflik. Hanya dengan keamanan yang terjamin, masyarakat dapat fokus pada perkembangan positif dan pencapaian potensi maksimal. Partisipasi politik juga merupakan aspek integral dalam membentuk *bonum communae*. Dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat dapat memastikan representasi yang adil dan demokratis. (Riyanto & Kovalenko, 2023, p. 5) Partisipasi politik memberdayakan individu untuk berkontribusi pada pembentukan kebijakan dan membentuk arah perkembangan masyarakat. Ini memperkuat ikatan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan masyarakat yang kokoh untuk penciptaan *bonum communae*.

Pendidikan dan pengetahuan memainkan peran penting dalam membentuk *bonum communae* dengan memastikan akses merata terhadap pengetahuan dan pendidikan. Akses pendidikan yang merata memberi kesempatan kepada semua individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan juga membentuk pemahaman bersama terhadap nilai-nilai moral dan etika, yang merupakan elemen penting dalam konsep *bonum communae*. Kesehatan adalah aspek lain yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mencapai *bonum communae*. Menjamin akses layanan kesehatan yang baik bukan hanya memberikan perlindungan terhadap penyakit, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. (Lardo, 2020, p. 5). Sebuah masyarakat yang sehat memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama dan menciptakan lingkungan yang berdaya. Aspek lingkungan hidup juga berperan dalam membentuk *bonum communae*. Dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, masyarakat dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang diperlukan untuk kesejahteraan jangka panjang tetap terjaga. Lingkungan yang sehat mendukung kehidupan manusia dan menciptakan dasar untuk perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu konsep yang tepat untuk tetap menjalankan pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistem adalah konsep *good environmental governance*. (Nur & Achmad Husen, 2022, p. 3) Kohesi sosial, sebagai aspek lain yang membentuk *bonum communae*, mencakup pembangunan hubungan yang kuat antara anggota masyarakat. Hubungan sosial yang positif dan saling mendukung menciptakan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. (Muhamad Chairul Basrun Umanailo, 2022, p. 90) Dalam suasana kohesi sosial, masyarakat lebih cenderung bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Terakhir, hak asasi manusia menjadi pondasi utama dalam pembentukan *bonum communae*. Perlindungan dan penghormatan hak-hak dasar setiap individu adalah prasyarat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Menjamin kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia

adalah langkah kunci untuk membangun fondasi kesejahteraan bersama. (Hutabarat et al., 2022, p. 12).

Konsep Etika *Eudaimonia* Aristoteles

Eudaimonia adalah konsep kunci dalam etika Aristotelian yang merupakan konsep filsafat mengenai kebahagiaan dan tujuan hidup manusia. Aristoteles seorang filsuf Yunani kuno yang hidup pada abad ke-4 SM, mengembangkan pandangan etika yang sangat berpengaruh yang menempatkan *eudaimonia* sebagai pusat pemikirannya. *Eudaimonia* dalam pemahaman Aristoteles bukan sekedar kesenangan semata atau kebahagiaan hedonis, melainkan merupakan keadaan kesejahteraan dan kebahagiaan yang mencakup pemenuhan potensi manusia secara penuh.

Aristoteles mendefinisikan *eudaimonia* sebagai tujuan tertinggi dan akhir dari kehidupan manusia. (Al-ahmed, 2021, p. 126) Ini adalah tujuan yang mencakup semua aspek kehidupan dan bertujuan untuk membawa individu menuju kebahagiaan tertinggi. Dalam pemikirannya, Aristoteles tidak hanya mengkaji bagaimana manusia seharusnya hidup, tetapi juga mengapa manusia hidup. *Eudaimonia* adalah jawaban atas pertanyaan ini dan menggambarkan kondisi dimana individu mencapai potensi dan maksud sejati hidup mereka. Ketika Aristoteles membahas *eudaimonia*, ia melihat dalam dua dimensi utama yakni dimensi etika dan dimensi intelektual. Dalam dimensi etika, *eudaimonia* mencakup pencapaian kebaikan moral. Ini berarti bahwa untuk mencapai *eudaimonia*, individu harus berkembang dan mengamalkan kebajikan moral yang mengarah pada perilaku etis dan baik. Contoh kebajikan moral termasuk keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan kedermawanan. Di sisi lain, dalam dimensi intelektual, *eudaimonia* mencakup pencapaian kebajikan intelektual. Ini mencakup kemampuan individu untuk mengembangkan pemahaman mendalam tentang etika, filsafat, dan prinsip-prinsip moral. Kebajikan intelektual ini memungkinkan individu untuk memiliki wawasan dan penilaian yang bijaksana dalam pengambilan keputusan moral. (Aristotle, 2000, p. 23)

Dalam pemikiran Aristoteles, *eudaimonia* (kebahagiaan tertinggi) terdiri dari beberapa komponen penting yang berkontribusi pada pencapaian kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Berikut adalah komponen-komponen *eudaimonia* menurut Aristoteles: *Pertama*, Kebajikan Moral (*Virtue of Character*). Salah satu komponen paling penting dari *eudaimonia* adalah pengembangan kebajikan moral. Ini mencakup keberanian, kebijaksanaan, keadilan, kedermawanan, dan berbagai kebajikan karakter lainnya. Aristoteles percaya bahwa kebajikan moral membentuk dasar dari perilaku etis yang membantu individu menjalani kehidupan yang baik. (Aristotle, 2000) *Kedua*, Kebajikan Intelektual (*Virtue of Thought*). Kebajikan intelektual adalah komponen yang memungkinkan individu untuk memahami dan merumuskan prinsip-prinsip etika dan filsafat. Ini termasuk kebijaksanaan praktis dan teoritis. Kebijaksanaan praktis memungkinkan individu untuk membuat keputusan moral yang bijaksana, sementara kebijaksanaan teoritis memungkinkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep moral. *Ketiga*, Aktivitas dan Kegiatan Moral. *Eudaimonia* juga melibatkan tindakan moral dan etis yang membantu individu memenuhi potensi mereka sebagai manusia yang baik. Ini termasuk perbuatan baik, kebijaksanaan dalam memilih tindakan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. *Keempat*, Kesehatan Fisik. Aristoteles menganggap kesehatan fisik sebagai komponen penting dari *eudaimonia*. Kesehatan fisik yang baik memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang aktif dan produktif. (Manampiring, 2019, p. 296) *Kelima*, Kesehatan Mental. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga menjadi aspek penting dalam pencapaian *eudaimonia*. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan emosional dan psikologis penting untuk memastikan kesejahteraan. *Keenam*, Hubungan Sosial yang Bermakna. *Eudaimonia* juga melibatkan hubungan sosial yang baik dan bermakna. Aristoteles percaya bahwa hubungan

sosial yang positif seperti persahabatan dan interaksi yang harmonis dengan orang lain, berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan individu. (Melandari, 2022, p. 105) *Ketujuh*, Aktivitas Intelektual. Aktivitas yang merangsang pikiran dan membantu dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman adalah bagian integral dari *eudaimonia*. Ini mencakup belajar, refleksi, dan eksplorasi intelektual. *Kedelapan*, Makna dan Tujuan dalam Hidup. *Eudaimonia* tidak hanya melibatkan kebahagiaan sekunder, tetapi juga makna dan tujuan dalam hidup. Individu yang mencapai *eudaimonia* merasakan bahwa mereka hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut. *Kesembilan*, Pengembangan Potensi Pribadi. Aristoteles meyakini bahwa mencapai *eudaimonia* juga melibatkan pengembangan dan potensi pribadi. Ini mencakup pengembangan kebijakan, peningkatan kebijaksanaan, dan peningkatan kemampuan individu. *Kesepuluh*, Keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip kunci dalam konsep *eudaimonia* menurut Aristoteles. Individu seharusnya mencari keseimbangan dalam perilaku, kebijakan, dan tindakan mereka. Keseimbangan adalah sikap tengah antara kekurangan dan kelebihan, dan ini memainkan peran penting dalam mencapai *eudaimonia*. (S, 2016, p. 60)

Menjadi catatan penting bahwa konsep ini merupakan konsep yang kompleks dan holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan individu. *Eudaimonia* tidak mungkin dicapai hanya dengan satu atau dua komponen saja. Sebaliknya pencapaian *eudaimonia* membutuhkan perhatian pada semua komponen ini dengan berusaha untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Dengan demikian *eudaimonia* adalah pencapaian yang rumit dan berkelanjutan yang melibatkan perkembangan moral, intelektual, fisik dan sosial individu.

Proses Mencapai *Eudaimonia*

Kebajikan moral dan kebijakan intelektual memainkan peran sentral dalam pemikiran Aristoteles mengenai *eudaimonia*, suatu kebahagiaan atau kesejahteraan sejati yang dicapai melalui perkembangan pribadi dan kehidupan yang bermakna. Dalam pemahaman Aristoteles, *eudaimonia* bukan sekedar kebahagiaan sesaat, tetapi merupakan pencapaian potensi manusia secara menyeluruh. Untuk mencapai *eudaimonia*, individu diharapkan mengembangkan kebijakan moral dan kebijakan intelektual. Kebijakan moral atau etika disebut sebagai *arête* moral dan berkaitan dengan perilaku dan karakter moral seseorang. Menurut Aristoteles, kebijakan moral adalah kecenderungan menuju titik tengah antara dua ekstrem, yang disebut sebagai *golden mean*. Sebagai contoh, keberanian adalah titik tengah antara ketakutan yang berlebihan dan keberanian yang berlebihan. Dengan mengembangkan kebijakan moral, individu belajar mengendalikan dorongan dan keinginan mereka, menciptakan karakter moral yang seimbang dan tetap. (Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus, 2023b)

Kebijakan intelektual, disebut sebagai *arête* *diamoetike*, berkaitan dengan akal budi dan kemampuan intelektual. Ini melibatkan pengembangan pikiran dan kebijaksanaan. Aristoteles memandang kebijakan intelektual sebagai kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan mengambil keputusan yang tepat. Kebijakan intelektual melibatkan kecakapan berpikir kritis, kecerdasan praktis, dan pengetahuan yang luas. Proses mencapai kebijakan intelektual melibatkan pengembangan potensi kognitif dan kebijaksanaan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian *eudaimonia*. (Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus, 2023a, p. 4)

Pentingnya kebijakan moral dan kebijakan intelektual dalam pencapaian *eudaimonia* terletak pada pandangan Aristoteles tentang manusia sebagai makhluk yang rasional. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan mengendalikan perilaku mereka. Kebijakan moral membantu manusia mengatasi dorongan dan keinginan yang merugikan, sementara kebijakan intelektual membimbing mereka dalam pengambilan

keputusan yang bijaksana. Dalam proses mencapai *eudaimonia*, individu tidak hanya berusaha untuk memperoleh kebahagiaan sesaat, tetapi juga untuk mengembangkan karakter moral yang baik dan pengetahuan yang mendalam. *Eudaimonia* dalam pandangan Aristoteles, tidak hanya hasil dari keberuntungan atau kesenangan jangka pendek, melainkan merupakan produk dari usaha dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan. (Aristotle, 2000) Pengembangan karakter dan habit merupakan bagian yang juga penting sebagai proses untuk mencapai *eudaimonia*, konsep kebahagiaan atau kesejahteraan sejati menurut Aristoteles. *Eudaimonia* bukan hanya tentang pencapaian tujuan atau kebahagiaan sesaat, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter moral yang baik dan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang bermakna.

Pertama-tama, pengembangan karakter merupakan langkah penting dalam mencapai *eudaimonia*. Aristoteles memandang karakter sebagai hasil dari kebiasaan moral yang terbentuk melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara konsisten. (Al-ahmed, 2021) Dalam pandangan ini, karakter moral adalah suatu kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang dipegang. Proses pengembangan moral dimulai dengan kesadaran terhadap nilai-nilai yang dianggap penting dan benar. Individu perlu memahami prinsip-prinsip moral yang akan membimbing tindakan mereka. Selanjutnya melalui refleksi dan latihan, individu dapat mengubah nilai-nilai tersebut menjadi kebiasaan moral yang terinternalisasi. Kebiasaan ini membentuk karakter yang menjadi landasan untuk pengambilan keputusan moral yang konsisten.

Habit atau kebiasaan juga memainkan peran kunci dalam perjalanan menuju *eudaimonia*. (Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus, 2023b) Karakter dan kebiasaan memiliki kaitan yang erat. Kebiasaan baik adalah kecenderungan untuk berperilaku positif secara teratur. Sebaliknya, kebiasaan buruk atau negatif dapat menghambat pencapaian *eudaimonia*. Proses pengembangan habit dimulai dengan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Konsistensi dalam tindakan-tindakan ini membentuk pola perilaku yang kemudian menjadi kebiasaan. Pentingnya habit terletak pada kemampuannya membentuk kebiasaan-kebiasaan positif yang membantu individu mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, kebiasaan belajar secara teratur, berolahraga, dan berperilaku baik terhadap orang lain dapat menjadi fondasi untuk mencapai *eudaimonia*. Habit membantu menciptakan pola hidup yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang dikehendaki.

Tantangan Realisasi *Bonum Communae* di Indonesia

Realisasi *bonum commune*, atau kebaikan bersama, merupakan tujuan ambisius yang menghadapi sejumlah tantangan kompleks di era kontemporer. Meskipun konsep ini menggambarkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat, berbagai faktor dan dinamika internal dan eksternal dapat menjadi hambatan dalam mencapai *bonum commune*. Analisis ilmiah ini akan menguraikan beberapa tantangan utama yang dapat menghambat pencapaian *bonum commune* terutama di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil beberapa tantangan bangsa Indonesia mencapai *bonum commune*, dimana faktor manusia atau peran individu ataupun masyarakat memiliki dampak yang lebih dominan, sehingga apabila individu atau masyarakat salah dalam mengambil keputusan, dapat berakibat fatal pada keberlangsungan hidup masyarakat, ataupun malah sebaliknya, ketika individu atau masyarakat mengambil keputusan yang tepat untuk bertindak dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tertentu, maka akan membawa dampak positif bagi semua masyarakat.

Salah satu tantangan paling signifikan adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang meluas dan perbedaan dalam distribusi kekayaan sering kali menjadi penghambat utama dalam mencapai kesejahteraan bersama. Adanya kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi dan

pendidikan dapat merusak fondasi *bonum communa*. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia merupakan tantangan yang serius dalam mencapai *bonum communa* atau kesejahteraan bersama. Fenomena ini mencakup perbedaan yang signifikan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, kesehatan serta peluang ekonomi di antara berbagai lapisan masyarakat. (Ainiyah, 2023, p. hlm. 5) Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga menjadi tantangan serius. Meskipun pendidikan dianggap sebagai elemen kunci dalam mencapai *bonum communa*, beberapa komunitas mungkin menghadapi hambatan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Faktor-faktor seperti kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya guru berkualitas, dan norma sosial yang menghambat pendidikan bagi beberapa kelompok dapat menyulitkan pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif. Kelompok masyarakat di daerah terpencil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas pendidikan berkualitas, sementara kelompok yang lebih mampu ekonomi memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan yang bermutu.

Faktor ekonomi yang tidak stabil, seperti resesi ekonomi atau fluktuasi pasar, dapat menjadi tantangan serius dalam mencapai *bonum communa*. Ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap layanan masyarakat, merugikan upaya untuk menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dampak ketidaksetaraan ekonomi tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Ketidaksetaraan ini dapat memicu munculnya lingkungan setan dimana kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi cenderung menghadapi kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. (Ainiyah, 2023) Akibatnya, ketidaksetaraan semakin memperbesar kesenjangan antarindividu dan kelompok masyarakat, menghambat perkembangan dan mobilitas sosial. Konflik dan ketidakstabilan politik di suatu wilayah dapat menjadi penghalang serius terhadap *bonum communa*. Konflik bersenjata, ketidakstabilan politik, dan kurangnya keamanan dapat menciptakan kondisi di mana pembangunan sosial dan ekonomi sulit dilakukan. Ini juga dapat menyulitkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Korupsi dan tata kelola negara adalah dua fenomena yang memiliki implikasi mendalam terhadap perkembangan suatu negara. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. (Napisa & Yustio, 2021, p. hlm. 2) Sementara tata kelola negara merupakan konsep yang melibatkan cara negara diatur dan dijalankan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi seringkali merupakan hasil dari interaksi kompleks korupsi dan ketidakmampuan implementasi tata kelola negara yang baik.

Korupsi, sebagai suatu perbuatan tidak etis, dapat dijelaskan dengan pendekatan ilmiah melalui analisis struktural dan sosial. Faktor-faktor struktural, seperti ketaksetaraan distribusi kekayaan dan kebijakan ekonomi yang tidak merata, dapat menciptakan lingkungan dimana praktik korupsi berkembang. Melalui teori ekonomi, dapat dipahami bahwa ketidaksetaraan ekonomi menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan dan sumber daya, yang menjadi katalisator korupsi. (Sofhian, 2020, p. 15) Sementara itu pendekatan sosial mengidentifikasi budaya korupsi dan kurangnya nirma anti-korupsi sebagai faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Sikap pribadi yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dapat terwujud dalam tindakan korupsi. Faktor-faktor sosial seperti budaya korupsi dan kurangnya nirma anti-korupsi dapat mempengaruhi perilaku individu. Kurangnya perasaan moral dan integritas dari pihak yang berwenang bisa menjadi pemicu tindakan korupsi seperti penyuaipan atau manipulasi dalam pengambilan keputusan. (Sofhian, 2020, p. 16) Tingginya tingkat individualisme dalam masyarakat juga dapat memperkuat dorongan untuk mengutamakan kepentingan pribadi.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, sikap pribadi yang lebih egois dapat merusak mekanisme pengambilan keputusan yang seharusnya mengutamakan kepentingan

masyarakat. Keputusan yang didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok kecil dapat mengarah pada penerapan kebijakan yang merugikan mayoritas. Dampaknya meluas ke dalam semua aspek pemerintahan, mencakup pembangunan ekonomi yang tidak merata, pemborosan anggaran, dan keputusan yang tidak transparan. (Sofhian, 2020, p. 3) Ketidaksetaraan dalam distribusi sumberdaya dan akses terhadap layanan publik seringkali muncul sebagai konsekuensi dari tata kelola pemerintahan yang buruk. Individu yang memiliki akses dan pengaruh dapat memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan, sementara masyarakat yang kurang berdaya menjadi korban kebijakan yang tidak memihak. Ketidaktransparanan dan keberlanjutan ketidaksetaraan menjadi siklus yang sulit dihentikan, memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Krisis lingkungan dan ekosistem merupakan tantangan serius dalam mencapai *bonum communa*. Fenomena ini terjadi ketika perilaku manusia menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem secara luas, mengancam keberlanjutan sumberdaya alam dan keseimbangan ekologi. (Frederikus Fios, 2019, p. 2) Salah satu contoh nyata dari kebiasaan buruk individu dan masyarakat yang berkontribusi terhadap krisis lingkungan adalah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan. Ketika individu dan masyarakat mengonsumsi secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab terhadap sumber daya alam, seperti dengan mengonsumsi makanan dengan kemasan plastik sekali pakai atau menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan, maka secara tidak langsung memperburuk kerusakan lingkungan. Selain itu, perilaku pembakaran hutan dan lahan untuk pertanian, kegiatan *illegal logging*, dan limbah industri yang tidak terkelola dengan baik juga merupakan contoh dari kebiasaan buruk yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah. Kerusakan alam dan ekosistem dapat dijelaskan melalui konsep ekologi yang melibatkan interaksi kompleks antara berbagai komponen ekosistem, seperti organisme hidup, lingkungan fisik, dan faktor manusia. Ketika kebiasaan buruk individu dan masyarakat menyebabkan perubahan drastis dalam lingkungan fisik, seperti pencemaran air, udara, tanah, serta hilangnya habitat alami, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekologi dan menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati. (Frederikus Fios, 2019, p. 2) Misalnya, pembakaran hutan menyebabkan kerusakan pada habitat berbagai spesies flora dan fauna, termasuk yang terancam punah, serta mengurangi kemampuan ekosistem yang menyerap karbon dan mengatur iklim. Krisis lingkungan dan ekosistem juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Kehilangan keanekaragaman hayati dapat mengurangi ketersediaan sumber daya alam serta meningkatkan resiko terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang besar.

KESIMPULAN

Analisis tantangan bangsa Indonesia menuju *bonum communa* dari perspektif etika *eudaimonia* Aristoteles mengundang pemikiran yang mendalam tentang bagaimana negara dapat mencapai kebahagiaan bersama atau kebaikan bersama yang merupakan tujuan utama dalam berpolitik dan berbangsa. Aristoteles, seorang filsuf Yunani kuno, memandang kebahagiaan bukan sebagai tujuan individual semata, tetapi juga sebagai tujuan kolektif yang mencakup keseluruhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai *bonum communa* ini, dan untuk memahaminya secara menyeluruh, perlu dilakukan analisis kritis terhadap beberapa aspek kunci. Pertama-tama, salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang luas. Dalam konteks *eudaimonia*, ketimpangan seperti ini akan menghalangi masyarakat dari mencapai kebahagiaan bersama. Aristoteles memandang bahwa kehidupan yang baik hanya mungkin jika masyarakatnya hidup dalam kesetaraan relatif, di mana kesenjangan ekonomi yang besar dapat menghasilkan ketidakadilan sosial dan merusak kebahagiaan

bersama. Di Indonesia, ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi antara kota dan desa, antara pulau-pulau yang kaya sumber daya alam dan yang tidak, serta antara kelompok etnis dan agama, semuanya merupakan tantangan serius dalam mencapai *bonum commune*. Selanjutnya, korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pencapaian *bonum commune* di Indonesia. Aristoteles menekankan pentingnya kebajikan dalam pemerintahan untuk mencapai kebahagiaan bersama. Namun, korupsi mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap keadilan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Aristoteles. Korupsi merusak moralitas publik, melemahkan lembaga-lembaga negara, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi korupsi menjadi sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung *bonum commune* di Indonesia.

Selain itu, tantangan lingkungan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam perjalanan Indonesia menuju *bonum commune*. Aristoteles menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam, di mana keberlangsungan lingkungan adalah prasyarat bagi kebahagiaan bersama. Namun, Indonesia menghadapi berbagai masalah lingkungan, termasuk deforestasi yang masif, degradasi tanah, pencemaran air, dan masalah kebisingan serta polusi udara di perkotaan. Tantangan lingkungan ini tidak hanya mengancam kesejahteraan manusia saat ini, tetapi juga kesejahteraan generasi mendatang. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya mencapai *bonum commune* di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, prinsip-prinsip etika *eudaimonia* Aristoteles dapat memberikan pedoman yang berharga bagi Indonesia. Pertama, pentingnya keadilan sosial dan ekonomi harus diutamakan, dengan mengurangi ketimpangan dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Kedua, pemerintah dan masyarakat harus berkomitmen untuk memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang baik, yang didasarkan pada kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Ketiga, perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas utama, dengan mengadopsi kebijakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap alam. Dan keempat, pentingnya membangun solidaritas sosial dan politik melalui dialog dan partisipasi publik yang inklusif.

REFERENSI

- Ainiyah, R. (2023). Dampak Ketidaksetaraan Ekonomi Terhadap Patologi Sosial Di Masyarakat Modern. *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 1(2).
- Al-ahmed, A. G. & S. (2021). *Logika Kritis Filsuf Klasik*. SOCIALITY.
- Andi Mauliyana & Astrid Veranita Indah. (2023). EUDAIMONIA DALAM FILSAFAT STOA SEBAGAI DASAR ETIKA. *Jurnal Aqidah-Ta*, 9(1), 33–50. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKB4wiyEZm7QMCfm_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1715943587/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal3.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Faqidah-ta%2Farticle%2Fview%2F37365%2F18122/RK=2/RS=sXqJHXL2yA2PcSyWa81wpxGAVpA-
- Aristotle. (2000). *Nicomachean Ethics* (C. Roger (Trans.)). Cambridge University Press.
- Febriano, Y. (2022). Bencana, Penderitaan, dan Kebahagiaan (Suatu Refleksi Filosofis Atas Penderitaan Manusia Di Tengah Bencana Dalam Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles). *Forum*, 51(1), 27–42. <https://doi.org/10.35312/forum.v51i1.392>
- Fios, F. (2019). Menjadi Manusia Spiritual-Ekologis Di Tengah Krisis Lingkungan - Sebuah Review. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v12i1.5066>
- Giovanni Aditya Arum. (2019). KONSEP KEADILAN (IUSTITIA) PERSPEKTIF ST. THOMAS AQUINAS DAN RELEVANSINYA BAGI PEMAKNAAN SILA V PANCASILA. *LUMEN VERITATIS Jurnal Teologi Dan Filsafat*, 12(1), 23–44.

- https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKBAOCzUZmnhYCS9DLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1715944963/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F336581224_KONSEP_KEADILAN_IUSTITIA_PERSPEKTIF_ST_THOMAS_AQUINAS_DAN_RELEVANSINYA_BAGI_PEMAKNAAN_SILA_V_PANCASILA/RK=2/RS=3gclxPezEFTdK_O0j0GW6wPYnGM-
- Hendrawan, D. dan S. U. (Ed.). (2019). *Bonum Commune Dalam Filsafat Barat*.
- Hutabarat, D. T. H., Gumelar, A., Al Madina, Sari, D. P., Azhar, K., Sinaga, M. S., Padila, N., Azhari, R., Simbolon, S. A., Khairani, S. M., & Pratama, Y. (2022). Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara. *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(2), 80–91. <https://doi.org/10.55047/jrpp.v1i2.213>
- Khoiron, A. K. & A. M. (2019). *PENELITIAN KUALITATIF*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lardo, S. (2020). Strategi Pembangunan Kesehatan Dan Ketahanan Nasional Dalam Perspektif Daya Juang Bangsa. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(1), 61. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i1.824>
- M. Riyanto & Vitalina Kovalenko. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan:Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/18164>
- Manampiring, H. (2019). *Filosofi Teras*. Kompas.
- Melandari, J. (2022). *Etika Nikomakea Dalam Perspektif Aristoteles Studi Atas Etika Manusia*. UIN Fatmawati Sukarno.
- Muh. Syainal Nur, & Husen, A. (2022). Studi Literatur: Penerapan Good Environmental Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35–49. <https://doi.org/10.21009/jgg.v11i1.25110>
- Muhamad Chairul Basrun Umanailo, M. . (2022). “*KOHESI SOSIAL DAN STRATEGI ADAPTASI DALAM PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI DESA*.” https://www.researchgate.net/publication/370899038_KOHESI_SOSIAL_DAN_STRATEGI_ADAPTASI_DALAM_PENGEMBANGAN_EKONOMI_DESA
- Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579.
- Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus. (2023a). Eudaimonia Filsafat Dalam Kontemporer Dengan Memahami Kebahagiaan Menurut Aristoteles. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(3), 820–826. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Eudaimonia+Filsafat+Dalam+Kontemporer+Dengan+Memahami++Kebahagiaan+Menurut+Aristoteles&btnG=
- Nikita Rasyidin & Phil Fitzgerald Kennedy Sitorus. (2023b). *Eudaimonia Filsafat Dalam Kontemporer Dengan Memahami Kebahagiaan Menurut Aristoteles Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*. 3(3), 821.
- Nur, M. S., & Achmad Husen. (2022). GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *JGG-Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35–49. <https://media.neliti.com/media/publications/457617-none-6bede289.pdf>
- Nurul, S., Riko, S. ;, Rahardianto, D., Serllyta, ;, Ramadhan, N., Naufal, ;, Sultan, R., & Sholla, ; (2023). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan

- Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1, 1–1. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Pinus Dandi. (2023). NILAI-NILAI ETIKA ARISTOTELES DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN MANUSIA INDONESIA. *LUMEN VERITATIS Jurnal Teologi Dan Filsafat*, 14(1), 41–52. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1QXSeyUZmAUwBbPTLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1715943967/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F374765769_NILAI-NILAI_ETIKA_ARISTOTELES_DALAM_MEWUJUDKAN_PERDAMAIAN_MANUSIA_INDONESIA/RK=2/RS=qKLvliBc0B3j.McXfv4rQU1DNms-
- Rifqi Alya Nur Ainiyah. (2023). DAMPAK KETIDAKSETARAAN EKONOMI TERHADAP PATOLOGI SOSIAL DI MASYARAKAT MODERN. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 1(2). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dampak+Ketidaksetaraan+Ekonomi+Terhadap+Patologi+Sosial+Di+Masyarakat+Modern%2C&btnG=
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- S, Y. P. D. (2016). Membangun Relasi: Etika Persahabatan Dalam Perspektif Aristoteles. *Jurnal UBM*.
- Salma Napisa & Hafizh Yustio. (2021). KORUPSI DI INDONESIA (PENYEBAB, BAHAYA, HAMBATAN DAN UPAYA PEMBERANTASAN, SERTA REGULASI) KAJIAN LITERATUR MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 564–579. <https://typeset.io/pdf/korupsi-di-indonesia-penyebab-bahaya-hambatan-dan-upaya-1eb78sw5xb.pdf>
- Sofhian, S. (2020). Penyebab Dan Pencegahan Korupsi: Kasus Indonesia. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 65–76. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.84>.